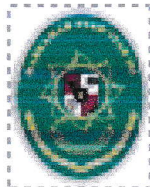


MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2018

JL. MEDAN - BANDA ACEH, KM. 381,
PAYA GAJAH, KEC. PEUREULAK
BARAT, KAB. ACEH TIMUR.



TELP/FAX/EMAIL/WEBSITE

(06 46) 7023073
Maids.office@gmail.com
www.Ma-Idi.co.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan berjalannya waktu dan seiring perkembangan dinamika hukum dan masyarakat yang semakin dinamis, kompleks dan didukung keterbukaan komunikasi dan informasi, tantangan yang dihadapi Mahkamah Syar'iyah Idi adalah untuk lebih berperan aktif dan menunjukkan peran dirinya di masyarakat serta dituntut kepeloporan dalam perubahan-perubahan yang cerdas, inovatif serta bermartabat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Idi dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi dirinya pada sektor yang sangat berkait erat dengan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembaharuan dan perbaikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dan juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan akan suatu media perencanaan yang dapat mengikat suatu instansi pemerintah agar mampu mewujudkan suatu kinerja yang telah disepakati dengan menggunakan sumber daya yang dialokasikan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kinerja Tahunan mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur.

BAB II

RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Strategis 2015 - 2019 Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai Rencana Jangka Pembangunan Menengah (RJPM) yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai pedoman perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun anggaran.

Untuk merealisasikan tahapan perencanaan lima tahunan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Idi telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2018 sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 telah diupayakan seiring dan sejalan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI yang berpedoman pada cetak biru (*blue print*).

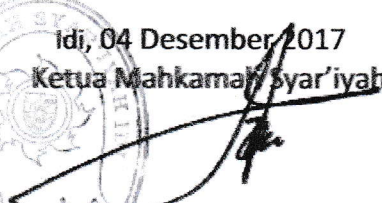
Rencana Kinerja Tahun 2018 ini sebagai tonggak awal Mahkamah Syar'iyah Idi dalam membangun sebuah sistem pelayanan berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan dan sebagai upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2018 Mahkamah Syar'iyah Idi adalah sebagaimana yang tergambar dalam matrik sebagai berikut :

**RENCANA KINERJA TAHUN 2018
MAHKAMAH SYAR'İYAH IDI**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti dan Akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Jinayat	- 100% - 100%
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Jinayat	- 89% - 100%
		c. Prosentase penurunan sisa - Perdata - Jinayat	- 95% - 100%
		d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya - Banding - Kasasi - PK	- 90% - 100% - 100%
		e. Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	- 100%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	- 100%
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	- 100%
		c. Prosentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses online dalam waktu 1 hari setelah putus	- 100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	- 100%
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	- 100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Prosentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	- 100%

Idi, 04 Desember 2017
Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi



DRS. SAID SAFNIZAR, MH

BAB II

RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Strategis 2015 - 2019 Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai Rencana Jangka Pembangunan Menengah (RJPM) yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai pedoman perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun anggaran.

Untuk merealisasikan tahapan perencanaan lima tahunan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Idi telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2018 sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 telah diupayakan seiring dan sejalan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI yang berpedoman pada cetak biru (*blue print*).

Rencana Kinerja Tahun 2018 ini sebagai tonggak awal Mahkamah Syar'iyah Idi dalam membangun sebuah sistem pelayanan berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan dan sebagai upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi.

BAB III

PENUTUP

Belum optimalnya Standar Kinerja pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas pada bidang keahliannya, menjadi pemicu Mahkamah Syar'iyah Idi dalam menyusun Rencana Kinerja dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat para pencari keadilan maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan lembaga peradilan.

Diharapkan Rencana Kinerja Tahun 2018 ini dapat menjadi bahan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018, yang nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.